

Penerapan Aplikasi Elektronik Tata Naskah (E-Taka) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Rahmawati Tri Maharani

12040674245 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: rahmamoeis@yahoo.com

Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP

0019018306 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: efanida@yahoo.com

Abstrak

Semakin dituntutnya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerjanya dalam melaksanakan tatanan pemerintahan, hal tersebut menjadi pendorong pelaksanaan serta penerapan electronic government (e-gov) yakni sebagai sistem pelayanan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi pada instansi pemerintahan. Oleh karena itu, E-Government wajib diterapkan di instansi-instansi pemerintahan termasuk di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Penerapan aplikasi elektronik tata naskah (E-Taka) merupakan aplikasi yang menghimpun dokumen kepegawaian, mengubah bentuk fisik dokumen menjadi bentuk digital dan dimuat dalam satu data base agar dapat lebih mudah dikelola dan ditemukan kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan aplikasi elektronik (E-Taka) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan fokus yang digunakan dalam penelitian penerapan aplikasi elektronik tata naskah (E-Taka) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur ialah Indikator-indikator dalam penerapan E-Government yaitu data infrastruktur, infrastruktur legal, infrastruktur institusional, infrastruktur manusia, infrastruktur teknologi, dan strategi pemikiran pemimpin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi elektronik Tata Naskah (E-Taka) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sudah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal karena terdapat beberapa kendala. Hal ini dilihat dari data infrastruktur yaitu adanya tahapan proses kerja yang berjalan baik, meski tidak lengkapnya dokumen yang dimiliki, infrastruktur legal yaitu adanya adanya landasan hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan, infrastruktur institusional yaitu adanya koordinasi antara staf BKD dan SKPD di lingkungan Provinsi Jawa Timur, infrastruktur manusia yaitu adanya 6 orang staf yang bertugas mengelola dokumen, infrastruktur teknologi yaitu adanya sarana prasarana yang sudah cukup terpenuhi, dan strategi pemikiran pemimpin yang meski baru terjadi pergantian kepala bagian akan tetapi mampu berperan dengan baik.

Kata Kunci : electronic government, E-Taka

Abstract

The development of technology and science, support the government to provide services that are easily accessible not only to the public and business partners but also to those who work the public sector. Getting sued the government in improving public service quality and performance in implementing the government order, it has become the driving execution and implementation of electronic government (e-gov) as an electronic-based service system that utilizes information technology in government agencies. Therefore, the E-Government shall be implemented in government agencies including the Regional Employment Board of East Java Province. Implementation of the electronic application system script (E-Taka) is an application that collects documents staffing, changing the shape of the physical documents into digital form and loaded into a data base that can be more easily managed and retrieved. This study aims to describe the implementation of electronic application system script (E-Taka) in the Regional Employment Board of East Java Province.

This research using descriptive analysis with qualitative approach. Data collection techniques using observation, interview, and documentation. While the focus used in the study implementation of the electronic application system script (E-Taka) in the Regional Employment Board of East Java Province are indicators in the implementation of E-Government is the data infrastructure, infrastructure legal, institution infrastructure, human infrastructure, technology infrastructure, and strategy thought leaders.

The result showed that the application of electronic applications system script (E-Taka) in the Regional Employment Board of East Java Province has been run well although not maximized because there are some obstacles. It is seen from the data infrastructure thah is the stage of the work process that goes well, though incomplete documents owned, infrastructure legal namely the existence of a legal basis that guide the implementation, institutional infrastructure that is the 6 staff tasked with managing documents, the

technology infrastructure that is the infrastructure that has been adequately met, and thinking strategies that although the new leader in case of replacement of the head but also has a good role.
Keyword: electronic government, E-Taka

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi aktivitas manusia yang banyak mengalami perubahan dan perkembangan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini juga sudah semakin berkembang luas. Hal ini, merupakan dampak dari perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan. Adanya perkembangan tersebut, mendukung pemerintah untuk memberikan layanan yang mudah diakses tidak hanya untuk masyarakat dan mitra bisnis akan tetapi juga untuk mereka yang bekerja disektor publik. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bresford dalam Kaiman (2003:7) bahwa dalam globalisasi yang sudah bergulir, menuntut penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tidak terkecuali pada birokrasi publik.

Semakin dituntutnya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerjanya dalam melaksanakan tatanan pemerintahan, hal tersebut menjadi pendorong pelaksanaan serta penerapan electronic government (e-gov) yakni sebagai sistem pelayanan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi pada instansi pemerintahan. Pengembangan dan pemanfaatan E-Government merupakan upaya dalam mendukung kinerja pemerintah yang berbasis elektronika dalam penyelenggaraan dan peningkatan kinerjanya secara efektif dan efisien. Electronic Government merupakan bentuk penerapan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagai media informasi dan sarana komunikasi interaktif antara pemerintah dengan pihak lainnya baik masyarakat, mitra bisnis maupun antar sesama lembaga pemerintahan.

Penerapan E-Government di Indonesia mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, kebijakan tersebut menegaskan bahwa pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan informasi. Oleh karena itu, E-Government wajib diterapkan di instansi-instansi pemerintahan termasuk di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pada awalnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Kepegawaian atau yang lebih dikenal dengan istilah SIMPEG. SIMPEG merupakan suatu totalitas yang

terpadu yang terdiri dari perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak, perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, ketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian. Kebijakan penerapan ini mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, menggantikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1985 Tentang Komputerisasi Kepegawaian.

Seiring dilaksanakan kebijakan tersebut, karena lingkup kerja yang semakin luas maka Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data BKD Provinsi Jatim berinisiatif menggunakan aplikasi elektronik tata naskah (E-Taka). Aplikasi ini merupakan aplikasi turunan dari aplikasi SIMPEG. Jika aplikasi SIMPEG menghimpun berbagai data pegawai serta menyimpannya dalam satu himpunan data (data base) dan hanya memuat data umum seperti data pribadi pegawai, data kepangkatan, data mutasi, dan data pensiun. Maka Aplikasi E-Taka ini menghimpun data dari seluruh pegawai yang ada diseluruh SKPD di Jawa Timur. Aplikasi E-Taka memuat naskah-naskah yang menjadi bukti akan data yang dimuat pada aplikasi SIMPEG, yakni meliputi surat keputusan (SK) kenaikan pangkat, SK kenaikan gaji, SK mutasi, dan data pribadi seperti kartu askes dan kartu pegawai (karpeg).

Penerapan aplikasi E-Taka ini mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Aplikasi E-Taka merupakan aplikasi yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan sistem informasi terpadu.

Arsip atau dokumen kepegawaian merupakan hal yang sangat penting, karena merupakan suatu alat atau bukti fisik rekam jejak karir seorang pegawai mulai dari diangkatnya pegawai sampai habis masa jabatannya atau saat pensiun. Oleh sebab itu, arsip atau dokumen tersebut perlu untuk dipelihara. Untuk itu, adanya aplikasi E-Taka ini dibuat agar bukti fisik tersebut dapat diubah dalam bentuk fisik ke bentuk digital agar lebih mudah ditemukan kembali apabila diperlukan untuk proses administrasi pegawai.

Adapun manfaat dari penerapan E-Taka diketahui dari hasil wawancara awal yang telah dilakukan oleh peneliti

kepada staf Doklahta BKD Provinsi Jatim, Bapak Thomas Tri Ardhiyanto:

“Semakin lama jumlah berkas fisik semakin banyak dan ruang yang terbatas akan menjadi tidak mencukupi. Jadi, untuk menghemat tempat penyimpanan dan memudahkan proses pencarian naskah dibuatlah E-Taka (elektronik tata naskah)”

Akan tetapi meski memiliki beberapa keunggulan, terdapat beberapa kendala dalam penerapan aplikasi E-Taka, hal ini seperti hasil wawancara awal yang telah peneliti lakukan kepada staf Doklahta BKD Provinsi Jatim, Bapak Wahyudi:

“Hambatan dari pelaksanaan E-Taka itu, kurangnya kesadaran atau inisiatif para pegawai negeri sipil (PNS) serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melengkapi atau menyerahkan data untuk diorganisir oleh Badan Kegawiaian Daerah (BKD) khususnya bidang Dokumentasi dan Pengelolaan Data (Doklahta). Sehingga data yang dientry tidak lengkap atau bahkan BKD tidak memiliki berkas pegawai tersebut. Banyak SKPD yang tidak punya alat scan, terutama di UPT. Selain itu, banyak operator yang kurang memahami atau mampu mengoperasikan aplikasi E-Taka, dikarenakan banyak yang sudah tua, juga tidak ada bimtek untuk operator. Dikarenakan bimtek hanya dilakukan sekali disaat aplikasi baru dibuat”.

Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa E-Taka merupakan aplikasi yang memiliki manfaat yang cukup besar bagi proses pengelolaan naskah yang nantinya dapat mendukung gerakan paperless dalam proses kerja instansi. Namun, kurangnya pembekalan mengenai pengelolaan naskah pegawai, menjadi penghabambat dalam penerapannya.

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam penerapan aplikasi E-Taka ini dirasa cukup penting dalam mempermudah proses pengelolaan data dan naskah kepegawaian. Adapun peneliti memilih Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur karena merupakan instansi pemerintah yang menerapkan dan mengembangkan sebuah website sebagai wujud dari kebijakan E-Government tersebut. Penelitian mengenai penggunaan aplikasi E-Taka dalam pengelolaan data kepegawaian dengan pendekatan kualitatif yang juga belum begitu banyak dilakukan di dalam penelitian di BKD Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

“Penerapan Aplikasi Elektronik Tata Naskah (E-Taka) di Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur yang terletak di Jalan Jemur Andayani 1 Kota Surabaya. Lokasi ini dipilih karena Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur ialah instansi yang menerapkan aplikasi Elektronik Tata Naskah (E-Taka).

Fokus Penelitian pada penelitian yakni bagaimana Penerapan Aplikasi Elektronik Tata Naskah (E-Taka) sebagai aplikasi dalam pengelolaan naskah pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan teori tentang Indikator-indikator dalam Pelaksanaan E-Government menurut Indrajit (2004), teori ini dirasa cocok dan mendekati masalah yang akan diteliti karena setiap bidang memiliki suatu indikator dalam penerapannya. Berikut adalah indikator-indikator tersebut:

- a. Data Infrastruktur, meliputi bagaimana manajemen sistem, dokumentasi, dan proses kerja ditempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas data. Dimana data infrastruktur ini berfungsi dalam mendukung penerapan aplikasi E-Taka.
- b. Infrastruktur Legal, meliputi hukum dan peraturan termasuk berbagai perizinan apa saja yang mendukung, dalam hal ini infrastruktur legal dan peraturan dalam penerapan aplikasi E-Taka.
- c. Infrastruktur Institusional, meliputi bagaimana peran institusi pemerintah dalam melakukan dan memfokuskan tujuannya untuk penerapan aplikasi E-Taka.
- d. Infrastruktur Manusia, menjelaskan bagaimana sumberdaya manusia merupakan hal pokok yang harus dipersiapkan didalam penerapan aplikasi E-Taka.
- e. Infrastruktur Teknologi, menjelaskan bagaimana penerapan aplikasi E-Taka banyak bertumpu apa adanya infrastruktur teknologi yang memadai.
- f. Strategi Pemikiran Pemimpin, menjelaskan bagaimana penerapan aplikasi E-Taka sangat membutuhkan pemikiran pemimpin yang membawa visi dalam agendanya dan memiliki strategi pemikiran untuk mewujudkannya.

Subjek penelitian yang meliputi: 1 orang Kepala Sub Bidang Dokumentasi Pengolahan dan Pelaporan Data Pegawai, 5 orang staf yang bekerja di Bidang Dokumentasi Pengolahan dan Pelaporan Data Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur yang akan menjadi informan dalam penelitian ini.. Teknik

pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif analisis data Miles dan Huberman yang meliputi: Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), *Conclusion Drawing/Verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan aplikasi Elektronik Tata Naskah (E-Taka) merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2014 yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam pelayanan administrasi perkantoran antar satuan instansi pemerintahan yang ada diseluruh Jawa Timur. Melalui penerapan aplikasi Elektronik Tata Naskah (E-Taka) diharapkan dapat mendukung gerakan *paperless* dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian, dengan mengubah naskah-naskah dinas yang berbentuk fisik menjadi naskah yang berbentuk digital. Dengan begitu aparatur pemerintahan dapat lebih melek teknologi dan memperluas wawasan dalam pemanfaatan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian terakait penerapan aplikasi elektronik tata naskah (E-Taka) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, peneliti melakukan analisis penerapan aplikasi elektronik tata naskah (E-Takah) melalui Indikator-Indikator dalam Penerapan *E-Government* (Indrajit, 2004) sebagai berikut:

1. Data Infrastruktur

Data Infrastruktur merupakan indikator yang menggambarkan bagaimana kesiapan data infrastruktur yang ada dalam mendukung penerapan *E-Government*. Menurut Indrajit (2004) kesipian data infrastruktur tersebut meliputi manajemen sistem, dokumentasi dan proses kerja ditempat untuk menyediakan kuantitass dan kualitas data yang berfungsi medukung penerapan *E-Government*.

Terkait dengan penerapan aplikasi elektronik tata naskah (E-Takah) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, ada beberapa tahapan dalam pengelolaan dokumen tata naskah yang dilakukan oleh Sub Bidang Dokumentasi Tata Naskah yakni: penerimaan dan pencatatan dokumen tata naskah pegawai, penyimpanan dokumen tata naskah pegawai, pemeliharaan dokumen tata naskah pegawai, penyusutan dan pemusnahan dokumen tata naskah pegawai.

Adanya tahapan dalam pengelolaan dokumen tata naskah, menunjukkan bahwa terdapat mekanisme atau manajemen sistem, dokumentasi serta proses kerja yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menunjang data infrastruktur dalam penerapan aplikasi E-Taka. Akan tetapi, dalam penerapannya masih ditemui kendala, diantaranya ialah kurangnya kesadaran para pegawai untuk menyerahkan dokumen kepegawaian

sehingga kelengkapan data yang dimiliki oleh Sub Bidang Dokumentasi dan Pengelolaan Data, sehingga sedikit menyulitkan ketika ingin memenuhi proses administrasi kepegawaian. Upaya yang dilakukan oleh Sub Bidang Dokumentasi Tata Naskah ialah dengan memberi surat edaran berupa himbauan agar pegawai di SKPD dapat secara rutin memberi dokumen kepegawaiannya.

2. Infrastruktur Legal

Infrastruktur legal merupakan indikator penting dalam penerapan *E-Government*, Indrajit (2004) menjelaskan bahwa dasar hukum dan peraturan-peraturan merupakan landasan dalam penerapan *E-Government*. Landasan ini merupakan dasar hukum dan peraturan-peraturan yang dapat menjadi strategi dari pemerintahan agar penerapan *E-Government* dapat berjalan berkesinambungan.

Terkait penerapan aplikasi elektronik tata naskah (E-Taka) adapun dasar hukum yang digunakan, diantaranya berupa peraturan perundang-undangan atau surat keputusan yang memiliki kekuatan hukum. Hukum dan peraturan yang menjadi pedoman tertulis ini perlu, agar dapat menjadi acuan dalam penerapan aplikasi E-Taka. Adapun pedoman tersebut antara lain: Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pedoman tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan dokumen tata naskah kepegawaian di Sub Bidang Dokumentasi Tata Naskah Pegawai dan telah sesuai dengan standar pengelolaan arsip. Pedoman yang digunakan sebagai acuan tersebut sangat mempermudah serta membantu dalam proses pengelolaan dokumen kepegawaian.

3. Infrstruktur Institusional

Indikator ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dalam membangun *E-Government*, meliputi bagaimana peran institusi pemerintah dalam melakukan dan memfokuskan tujuannya. Menurut Indrajit (2004) Salah satu cara meningkatkan kesadaran dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan baik antar lembaga tentang penerapan *E-Government*. Selain melakukan koordinasi dapat juga dilakukan dengan melakukan komunikasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan kerjasama antar lembaga.

Koordinasi ini perlu dilakukan mengingat aplikasi E-Taka ialah aplikasi yang memuat data dari seluruh pegawai yang ada diseluruh pegawai SKPD di lingkungan Provinsi

Jawa Timur. Dalam penerapan aplikasi elektronik tata naskah (E-Taka), koordinasi dilakukan dengan cara pembagian tugas pada masing-masing staf. Pembagian tersebut dilakukan sesuai kesepakatan pegawai dan dibagi dengan jumlah sama rata, yakni 1 orang staf rata-rata mengolah 3000 dokumen pegawai SKPD. Jadi tiap staf berkoordinasi dengan SKPD yang telah dibagi. Demikian bisa lebih efektif, dengan jumlah SKPD yang ada di lingkungan Provinsi Jatim yang mencapai 49SKPD, maka dibagi untuk 6 staf agar lebih efisien.

4. Infrastruktur Manusia

Indikator ini merupakan indikator terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi bergantung pada sumberdaya manusia yang dimiliki. Sesuai dengan penjelasan Indrajit (2004) penerapan *E-Government* dalam pelaksanaannya membutuhkan kemampuan sumberdaya aparatur, karena penerapan *E-Government* harus didukung dengan aparatur yang berkompeten dibidang teknologi informasi.

Dalam penerapan aplikasi elektronik tata naskah (E-Taka) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, tidak hanya sumberdaya aparatur yang mampu dibidang teknologi informasi, Tetapi dibutuhkan juga sumberdaya aparatur yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus mengenai kearsipan, Karena dalam penerapan aplikasi E-Taka melalui proses pengelolaan dokumen tata naskah pegawai terlebih dahulu. Jumlah staf yang bertugas mengelola dokumen kepegawaian di Sub Bidang Dokumen Tata Naskah sebanyak 6 orang, dimana tidak semuanya memiliki latar belakang dibidang teknologi informasi dan kearsipan, diantaranya hanya ada satu orang yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi. Akan tetapi dengan adanya pelatihan dan keterampilan yang dimiliki oleh para staf, penerapan aplikasi E-Taka masih terus berjalan. Meski terkadang didapati hambatan karena jumlah staf yang terbatas dengan jumlah dokumen yang terus menerus bertambah, serta staf yang memiliki tugas ganda.

5. Infrastruktur Teknologi

Sebagai salah satu indikator, infrastruktur teknologi memiliki peran yang penting, karena penerapan sebuah proyek *E-Government* bertumpu pada infrastruktur teknologi. Dalam Indrajit (2004) dijelaskan bahwa Inisiatif penerapan *E-Government* banyak bertumpu pada infrastruktur teknologi maka penerapan-penerapan *E-Government* harus disesuaikan dengan kondisi infrastruktur yang tersedia.

Pada penerapan aplikasi elektronik tata naskah (E-Taka), pemanfaatan alat atau sarana teknologi merupakan penunjang pada proses pelaksanaannya. Sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan untuk melakukan pengelolaan arsip-arsip kepegawaian dengan baik sesuai

dengan prosedur dan mekanisme pengelolaan arsip yang baku.

Sarana dan prasarana tersebut diantaranya terdiri dari: map gantung untuk menyimpan dokumen pegawai, lemari arsip atau filling cabinet, buku agenda, beberapa unit komputer dan alat *scanner*, label untuk penulisan NIP Pegawai, kapur barus, beberapa unit AC, pengharum ruangan, alat pemadam kebakaran atau *hydrant*, *vacuum cleaner*, kabel data, *external hard disc*, LAN, server dan beberapa sarana lainnya. Selain untuk mendukung kegiatan pemeliharaan, terdapat ruangan khusus sebagai tempat penyimpanan dokumen kepegawaian. Meski saat ini tempat penyimpanan terbatas, sehingga sedikit menghambat karena jumlah dokumen yang terus bertambah. Upaya yang dilakukan untuk masalah ini ialah dengan rencana perluasan ruang penyimpanan agar mampu menampung dokumen-dokumen kepegawaian yang ada di Sub Bidang Dokumentasi dan Pengelolaan Data.

6. Strategi Pemikiran Pemimpin

Indikator ini menjelaskan bagaimana peran seorang pemimpin dalam penerapan sebuah proyek *E-Government*. Penerapan *E-Government* didalam pelaksanaannya membutuhkan pemimpin yang mempunyai visi dan misi yang berkaitan dengan *E-Government* (Indrajit, 2004). Dalam penerapan aplikasi elektronik tata naskah (E-Taka) pemimpin yang ada memiliki peran yang penting. Di BKD Provinsi Jawa Timur, Meski baru terjadi pergantian pimpinan di bidang dan sub bidang Dokumentasi dan Tata Naskah Pegawai, tetapi perannya sebagai pemimpin berjalan dengan baik, hal tersebut terlihat bagaimana pemimpin tersebut memiliki wawasan yang cukup, mempunyai visi dengan memiliki inovasi, yakni dengan melakukan persiapan adanya aplikasi baru untuk mengefisiensi kinerja, dan mampu berkomunikasi yang baik yakni dengan mau mengapresiasi pendapat para staf, sehingga memiliki hubungan yang baik antara pemimpin dan para staf.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian tentang penerapan aplikasi elektronik tata naskah (E-Taka) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan aplikasi elektronik tata naskah (E-Taka) telah berjalan dengan baik meskipun belum sepenuhnya berjalan secara maksimal karena terdapat beberapa kendala serta hambatan, akan tetapi telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala maupun hambatan tersebut. Adapun penjelasan atau uraian singkat mengenai indikator-indikator dalam penerapan *E-Government* terkait dengan penerapan aplikasi elektronik tata naskah (E-Taka).

Data Infrastruktur, penerapan aplikasi elektronik tata naskah (E-Taka) memiliki beberapa tahapan dalam pengelolaan dokumen tata naskah yang dilakukan oleh Sub Bidang Dokumentasi Tata Naskah yakni: penerimaan dan pencatatan dokumen tata naskah pegawai, penyimpanan dokumen tata naskah pegawai, pemeliharaan dokumen tata naskah pegawai, penyusutan dan pemusnahan dokumen tata naskah pegawai, serta kelengkapan dokumen tata naskah pegawai. Dan telah berjalan baik, meski masih terdapat hambatan karena ketidak lengkapan dokumen yang dimiliki, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini ialah dengan memberi surat edaran yang menghimbau agar secara rutin mengirimkan updating data atau dokumen.

Infrastruktur Legal, penerapan aplikasi elektronik tata naskah memiliki landasan hukum yang menjadi pedoman atau acuan dalam pelaksanaannya, landasan hukum tersebut terdiri dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Infrastruktur institusional, dalam penerapan aplikasi elektronik tata naskah (E-Taka) koordinasi dilakukan dengan cara pembagian tugas pada masing-masing staf. Jadi tiap staf berkoordinasi dengan SKPD yang telah dibagi. Demikian bisa lebih efektif, dengan jumlah SKPD yang ada di lingkungan Provinsi Jatim yang mencapai 49SKPD, maka dibagi untuk 6staf agar lebih efisien. Serta adanya sosialisasi khusus yang dilaksanakan 3kali dalam satu tahun.

Infrastruktur Manusia, untuk penerapan aplikasi elektronik tata naskah (E-Taka) di BKD Provinsi Jawa Timur jumlah staf yang bertugas mengelola dokumen kepegawaian di Sub Bidang Dokumen Tata Naskah sebanyak 6 orang, dimana tidak semuanya memiliki latar belakang dibidang teknologi informasi dan kearsipan. Akan tetapi dengan adanya pelatihan dan keterampilan yang dimiliki oleh para staf, penerapan aplikasi E-Taka dapat terus berjalan.

Infrastruktur Teknologi, Pada penerapan aplikasi elektronik tata naskah (E-Takah), infrastruktur teknologi yang terdiri dari sarana prasarana sudah cukup terpenuhi. Sarana dan prasarana tersebut yakni sarana yang menunjang untuk proses kegiatan pengelolaan dokumen. Untuk mendukung kegiatan pemeliharaan, terdapat ruangan khusus sebagai tempat penyimpanan dokumen kepegawaian. meski masih terdapat beberapa kekurangan,

yakni karna dokumen yang terus bertambah dengan kondisi ruangan yang masih terbatas. Akan tetapi ada perencanaan perluasan tempat penyimpanan arsip pegawai untuk mengatasi kenadal tersebut.

Strategi Pemikiran Pemimpin, Dalam penerapaaan aplikasi elektronik tata naskah (E-Taka) di BKD Provinsi Jawa Timur, Meski baru terjadi pergantian pimpinan di bidang dan sub bidang Dokumentasi dan Tata Naskah Pegawai, tetapi perannya sebagai pemimpin berjalan dengan baik. Adanya inovasi yang dilakukan saat ini sedang ada persiapan untuk program baru, yakni aplikasi yang dapat memiliki fungsi ganda dari aplikasi SIMPEG dan E-Taka, agar nantinya dapat menjadi aplikasi yang lebih efisien.

Saran

Berdasarkan atas uraian hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran yang dapat menjadi masukan untuk penerapan aplikasi elektronik tata naskah (E-Taka) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur agar dapat berjalan lebih baik lagi, saran tersebut diantaranya:

1. Diharapkan koordinasi yang dilakukan dapat diperbaiki lagi, agar terwujudnya kelengkapan dokumen untuk mempermudah proses administrasi.
2. Diharapkan adanya penambahan staf agar dapat berjalan lebih efisien.
3. Adanya pelatihan secara rutin untuk menambah dan mengasah keterampilan pegawai.
4. Diharapkan dengan adanya perencanaan program baru, aplikasi yang diterapkan nantinya memiliki perencanaan yang baik dan dilakukannya pelatihan serta sosialisai rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Susanto. 2004. *Sistem Information Manajemen*. Bandung:Lingga Jaya
- Indrajit, Richardus Eko, et all. 2002. *Electronic Governmen : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi
- (2004). *Buku Pintar Linux : Membangun Aplikasi e-Government*. Jakarta: PT Elex Media Komputerindo
- Indrajit, Zainuddin, Rudianto. 2005. *e-GOVERNMENT IN ACTION: Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta:Andi
- Yakub. 2012. *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rizka, Agusniar. 2009. *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah Surakarta*. Skripsi

Tidak Diterbitkan. Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Ketty, Maria. 2014. *Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Untuk Mendukung E-Government Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya

Purwono, Edi. 2006. *Kebijakan dan Prosedur Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Peraturan Perundang-Undangan :

Instruksi Presiden Nomor. 3 tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Pegawai Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dokumen Dan Data Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur